Etnis Tionghoa pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta

Sarah Oktaviany Br Ginting[1*], Syaiful M[2*], Yustina Sri Ekwandari[3*]
FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung
e-mail: sarahoktaviany93@gmail.com, HP. 082268380440

Received: September 30, 2019 Accepted: October 1, 2019 Online Published: October 2, 2019

Abstract: Chinese Ethnic at the May 1998 riots of Jakarta. *The aim of this study was to find out the background of Chinese ethnic as victims at the May 1998 riots of Jakarta. This study used historical research methods with the data collecting techniques used are library and documentation. The results showed that the background of Chinese ethnic as victims at the May 1998 riots of Jakarta is dominated by the economy of Chinese entrepreneurs, relation between Chinese entrepreneurs with ruler of new order, citizenship status and anti-Chinese sentiments, the assimilationist policies implementation towards Chinese ethnic, Chinese entrepreneurs corrupt practices during the economic crisis, and separate settlement.*

Keywords: *jakarta, may, chinese*

Abstrak: Etnis Tionghoa pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Tujuan penelitian untuk mengetahui latar belakang etnis Tionghoa menjadi korban pada peristiwa Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan dokumentasi. Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa yang menjadi latar belakang etnis Tionghoa menjadi korban pada peristiwa Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta adalah pengusaha Tionghoa mendominasi perekonomian, adanya relasi antara pengusaha Tionghoa dengan penguasa Orde Baru, status kewarganegaraan dan sentimen anti-Tionghoa, implementasi kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa, praktik korupsi pengusaha Tionghoa pada saat krisis ekonomi, serta pemukiman yang terpisah.

Kata kunci: jakarta, mei, tionghoa

PENDAHULUAN

Sejak dimulainya masa Orde Baru, pemerintah mulai fokus untuk memulihkan kondisi politik dan perekonomian negara akibat berbagai kesulitan ekonomi domestik, tingkat inflasi yang tinggi, dan beban luar negeri yang sangat berat peninggalan pemerintahan Presiden Soekarno. Seiring berjalannya waktu, Indonesia berhasil meningkatkan stabilitas keamanan negara dan peningkatan pembangunan dan ekonomi.

Indonesia dapat memperoleh pujian dari pihak Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) atas keberhasilan pertumbuhan perekonomiannya yang fantastis (di atas 7 persen), bahkan sempat memperoleh julukan sebagai "*the miracle of Asia*" (setelah Singapura dan Thailand) (Fredy B.L Tobing, 2013:4)**.**

Setelah melalui beberapa dekade, pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis Moneter. Mahdi Mahmudy menyatakan bahwa Krisis Asia yang dipicu pertama kali devaluasi Thai Baht pada awal Juli tahun 1997, kemudian dikenal dengan "Tom Yum Effect", telah membawa gelombang jatuhnya mata uang, serta melemahnya pasar modal negara-negara tetangganya seperti Malaysia, Korea, Philipina, serta Indonesia (Mahdi Mahmudy, 2003:186).

Fenomena tersebut mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi. Berbagai kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Orde baru dalam mengatasi krisis moneter tidak berjalan dengan baik sehingga tetap berlanjut dan berkembang menjadi krisis ekonomi, bahkan, dari krisis ekonomi tersebut memunculkan krisis kepercayaan yang semakin besar terhadap pemerintahan Presiden Soeharto.

Tanggal 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di Jakarta. Saat itulah peristiwa Trisakti meletus. Saat terjadi kerusuhan dimana-mana situasi menjadi tidak terkendali. Apalagi pada peristiwa Trisakti meletus, empat mahasiswa Universitas Trisakti meninggal akibat bentrok dengan aparat keamanan. Gejolak dari peristiwa tersebut ternyata membawa dampak buruk bagi bangsa Indonesia termasuk salah satunya etnis Tionghoa, mereka juga menjadi korban atas kerusuhan tersebut.

Dominasi partai politik tertentu dan terlalu kuatnya kekuatan Presiden yang didukung oleh angkatan bersenjata menjadi kekuatan yang sinergis untuk meredam demokrasi pada masa Orde Baru. Tingginya kesenjangan sosial antara kelas atas dan kelas bawah menjadi konflik terpendam antar etnis yang kapan saja bisa meledak.

Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta yang kemudian merambah ke beberapa daerah lainnya. Rumah-rumah, toko, segala yang dianggap sebagai milik dari etnis Tionghoa dirusak dan dijarah. Peter K (2015:9) menyebutkan bahwa Tim Usakti selama survei mencatat sekita 700 gedung luluh lantak yang terdiri dari 218 toko, 165 ruko, 155 bank, 91 perkantoran, 32 pusat pertokoan, 2 menara apartemen di Pluit, 21 rumah, dan beberapa gudang serta hotel.

Wilayah Pecinan mengalami kerusakan parah. Daerah Glodok, yang paling tua dibangun pada tahun 1974 setelah kerusuhan anti-

Tionghoa mengalami perusakan. Termasuk rumah cukong Soeharto, Liem Sioe Liong. Begitu pula wilayah Kota sampai Senen lewat Mangga Besar dan Pasar Baru yang merupakan wilayah hunian etnis Tionghoa pertama. Wilayah lain yang mengalaminya adalah Ciledug, di sebelah barat Kebayoran. Kerusuhan juga melanda dari Grogol sampai Cengkareng sepanjang Jalan Daan Mogot. Perusakan terjadi terjadi pula di perumahan yang lebih baru di Pluit (Peter K, 2015:164).

Tanggal 16 Mei 1998 mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta mulai bergerak menuju gedung DPR/MPR. Mereka terus berdatangan memenuhi gedung bahkan sampai naik ke atas atap gedung dari waktu ke waktu. Tuntutan yang mereka suarakan adalah Soeharto harus turun dari jabatan presiden. Presiden Soeharto kemudian mengumumkan mundur sebagai presiden di hadapan wartawan media pada tanggal 21 Mei 1998.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Apa sajakah yang melatarbelakangi etnis Tionghoa menjadi korban pada peristiwa Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta?". Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang etnis Tionghoa menjadi korban pada peristiwa Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta.

METODE

Metode dalam penelitian sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian. Umumnya yang disebut metode adalah cara atau prosedur untuk mendapat objek. Juga dikatakan bahwa metode adalah cara untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu dalam system yang terencana dan teratur, sehingga metode selalu erat hubungannya dengan prosedur, proses, atau teknik yang sistematis untuk melakukan penelitian disiplin tertentu (L. Gottschalk 1986:11).

Adapun metode yang digunakan untuk mempermudah proses penelitian yang akan dilakukan dikemudian hari adalah metode penelitian historis. Metode penelitian ini merupakan cara yang menetapkan fakta dan mencapai simpulan mengenai hal-hal yang telah lalu, yang dilakukan secara sistematis dan objektif oleh ahli sejarah dalam mencari, mengevaluasi, dan menafsirkan bukti-bukti untuk mempelajari masalah baru tersebut. Tujuan penelitian historis adalah membuat rekontruksi masa lampau secara objektif dan sistematis dengan cara mengumpulkan, memverifikasikan, mengintesakan bukti-bukti untuk memperoleh kesimpulan.

Menurut Louis Gottschalk metode historis adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu (Louis Gottschalk, 1986 : 32).

Penelitian historis merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk merekonstruksi kembali secara sistematis, akurat, dan objektif kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau dengan menggunakan pendekatan normatif dan interpretatif (Muri Yusuf, 2014:346).

Menurut Nugroho Notosusanto (1984:11) langkah-langkah dalam penelitian historis, yaitu :

1. Heuristik adalah proses mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah.

2. Kritik adalah menyelidiki apakah jejak sejarah itu asli atau palsu.
3. Interpretasi adalah setelah mendapatkan fakta-fakta yang diperlukan maka kita harus merangkaikan fakta-fakta itu menjadi keseluruhan yang masuk akal.
4. Historiografi adalah suatu kegiatan penulisan dalam bentuk laporan hasil penelitian.

Variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan peneltian. Sering pula dinyatakan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti (Sumadi, 1983:72). Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu variabel yaitu dengan fokus penelitian pada latar belakang etnis Tionghoa menjadi korban pada Kerusuhan Mei 1998.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik kepustakaan dan dokumentasi. Teknik kepustakaan atau cenderung dikenal sebagai teknik studi pustaka, bila mengacu pada pengertian yang ditulis oleh Jonathan Sarwono, mengemukakan bahwa studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang ditulis dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat, serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sebuah media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian (Jonathan, 2006:34,35).

Menurut Hadari Nawawi menyatakan bahwa teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil-dalil atau buku-buku lain yang berkenaan dengan masalah-masalah penyelidikan (Hadari Nawawi, 1991:133).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka teknik dokumentasi adalah proses mencari dan mengumpulkan data melalui catatan, dokumen, arsip dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga peneliti bisa mendapatkan data. Hal ini dilakukan dengan mencari arsip yang berhubungan dengan latar belakang etnis Tionghoa menjadi korban pada Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut Fossey, cs (dalam Muri Yusuf, 2014 : 400) analisis data kualitatif merupakan proses mereviu dan memeriksa data, meyintesis, dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti.

Terdapat beberapa langkah dalam melakukan analisis data, yaitu:
1. Penyusunan Data. Penyusunan data dilakukan untuk membantu memudahkan penelitian terhadap semua data yang diperlukan dalam penelitian, dimana selanjutnya ditindaklanjuti melalui seleksi setelah mendapatkan data-data yang relevan.
2. Klarifikasi Data, dalam hal ini data-data yang telah ditemukan kemudian diklarifikasi dengan cara menggolongkan data sesuai dengan sub-sub permasalahan yang relevan dengan penelitian.
3. Penggolongan Data. Setelah

data diperoleh dan diklarifikasi kemudian diseleksi kembali melalui teknik analisis kualitatif. Diseleksi dalam hal ini berarti menggolongkan dan mengatur data yang telah ditemukan, maksudnya agar data-data yang menjadi sumber penelitian tersebut kemudian diolah dalam tahap penginterpretasian, penganalisaan lebih lanjut hingga pada tahap penarikan kesimpulan.

4. Penyimpulan Data, sebagai langkah akhir dalam penelitian merupakan penarikan suatu kesimpulan dari hasil kerja penelitian yang telah dilakukan melalui prosedur ilmiah yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan (Muhammad Ali, 1998:152).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PengusahaTionghoaMendominasi Perekonomian

Undang-Undang Penanaman Modal Asing merupakan produk hukum yang baru diciptakan di masa transisi kepemimpinan nasional menjadi satu langkah pemerintahan Soeharto untuk memulihkan perekonomian nasional dengan cara menarik modal asing. Pemberlakukan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN) ini mulai berjalan efektif ketika dimulainya masa Orde Baru.

Terlepas dari kebijakan pemerintah Orde baru dalam meningkatkan dominasi ekonomi oleh etnis Tionghoa di Indonesia, ternyata terdapat faktor intern dari golongan etnis Tionghoa. Siswono (1985:75) menyatakan bahwa masyrakat Cina memiliki sifat/karakter yang menonjol, yaitu hemat, tekun, luwes, barani berspekulasi serta bersemangat wirausaha yang tinggi.

Di bawah kebijakan ekonomi yang liberal ini, kedudukan ekonomi orang Tionghoa menguat. Mereka berkembang melampaui batas negara Indonesia dan masuk ke arena internasional. Di antara konglomerat-konglomerat yang berjumlah 200-300 orang, terdapat banyak pribumi, namun terbanyak adalah nonpribumi. Sebelum krisis moneter, majalah *Eksekutif* pada Agustus 1995, misalnya memuat daftar 100 konglomerat terbesar di Indonesia. Dari daftar tersebut hanya ada 20 orang pribumi, 1 orang India, dan sisanya orang Tionghoa. Hal ini sering dilihat sebagai gagalnya pribumisasi yang bertujuan untuk memperlemah ekonomi orang Tionghoa. Namun, pada dekade terakhir Orde Baru, konglomerat yang berhubungan dekat dengan keluarga Cendana tumbuh semakin besar sehingga menjadi sorotan media internasional (Abdul Syukur dkk, 2012:461).

Salah satu dari pengusaha-penguasaha besar Tionghoa pada masa Orde Baru, Liem Sioe Liong (Sudono Salim) adalah yang paling terkenal. (Siswono, 1985:83) namanya tidak dapat dipisahkan dengan nama-nama kelompok perusahaan-perusahaan besar seperti P.T. Bogasari, pabrik terigu, P.T. Indocement, Bank Central Asia,

Hotel Mandarin, PT. Multicor, P.T. Waringin Kencana & Crumb Rubber, P.T. Tarumatex, Nugraha Kencana, Asuransi Central Asia, dan lain-lain, yang merupakan deretan group usaha-usaha besar yang mencakup banyak bidang strategis bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

Relasi antara Pengusaha Tionghoa dan Penguasa Orde Baru

Presiden Soeharto ternyata memiliki hubungan dengan para pengusaha etnis Tionghoa. Ia bersama kroni-kroninya (dalam hal ini etnis Tionghoa) memiliki hubungan kerja sama. Sebut saja seperti yang dikenal publik yaitu Sudono Salim dan Bob Hasan. Para kroni tersebut adalah pengusaha keturunan Tionghoa yang telah menyokong program-program pemerintahan Soeharto terutama melalui yayasan yang dibentuk oleh Presiden dan keluarganya. Keberadaan para kroni tersebut telah banyak membawa keuntungan bagi Presiden Soeharto. Hubungan ini ternyata diselingi oleh kepentingan di masing-masing pihak, etnis Tionghoa berusaha mendapat keselamatan atas sentimen anti-Cina di kalangan masyarakat, sedangkan untuk Presiden Soeharto adalah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sosial Presiden.

Pada tahun 1989 misalnya, tercatat bahwa yayasan tersebut berhasil menghimpun simpanan deposito pada bank-bank BUMN sebanyak Rp 1.695 miliar di mana Rp 755 miliar diantaranya ditanamkan pada perusahaan - perusahaan seperti dana pensiun, rumah sakit maupun membiayai kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan yang mempunyai tujuan politik tertentu (Fredy B.L Tobing, 2013:37).

Para pengusaha Tionghoa merupakan pihak yang langsung mengoperasikan bisnis, namun mereka tidak bisa beroperasi secara mandiri karena mereka memerlukan birokrat agar dapat memperoleh akses sumber-sumber ekonomi itu yang berupa proyek, kontrak, konsesi, kebijakan, bahkan hak monopoli, dana, dan subsidi. Di sisi lain, para birokrat atau pejabat Orde Baru yang ingin menjalankan bisnis bukanlah kalangan yang memiliki modal, teknologi, pengetahuan maupun pengalaman mengelola bisnis sehingga mereka bersekutu dengan para pengusaha Tionghoa yang ingin bersekutu dengan mereka dan mendirikan perusahaan mereka sendiri. Praktik ini merupakan hal yang saling menguntungkan dikedua belah pihak, namun dalam perkembangan ekonomi nasional hal ini merupakan praktik yang tidak sehat. Ketergantungan diantara kedua.

Adanya relasi seperti ini memperjelas bahwa relasi bisnis yang dibangun oleh Orde Baru adalah persekutuan-persekutuan utama yang terjalin antara birokrat politik dengan pengusaha Tionghoa dan asing. Hubungan kerja sama antara para pengusaha Tionghoa dan pemerintah Orde Baru berhasil melahirkan konglomerat nasional,

yang sebagian besar dimiliki oleh penguasaha Tionghoa.

Status Kewarganegaraan dan Sentimen anti-Tionghoa

Memasuki era kemerdekaaan pada tahun 1945, status kewarganegaraan seseorang harus diperjelas menggunakan Undang-Undang Kewarganegaraan, sama halnya dengan etnis Tionghoa di Indonesia, mereka harus memiliki status kewarganegaraan. Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi etnis Tionghoa dimana mereka harus memilih salah satu dari dua kewarganegaraan tersebut.

Di Indonesia istilah "Tionghoa" untuk orangnya dan "Tiongkok" untuk orangnya mulai digunakan oleh etnis Tionghoa dan kelompok lain, istilah itu diterima oleh pemerintah dan pers Indonesia. Namun, terjadi perubahan yang bermula pada Seminar Angkatan Darat pada Agustus 1966 yang memutuskan penggantian istilah Tionghoa dan Tiongkok menjadi Cina untuk menunjukkan amarah rakyat Indonesia terhadap RRC.

Setelah memasuki era Ode Baru, pemerintah memutuskan segala bentuk hubungan dengan negara Tiongkok, sehingga perjanjian Dwi Kewarganegaraan dibatalkan. Orang-orang Tionghoa yang menetap di Indonesia wajib menjadi Warga Negara Indonesia dan memutuskan segala bentuk hubungan dengan negara Tiongkok.

Sebagai kelanjutan status kewarganegaraan orang-orang Tionghoa di Indonesia, pemerintah Orde Baru tepatnya pada tahun 1978 mengeluarkan peraturan Menteri Kehakiman yang mewajibkan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) bagi warga Tionghoa. Tahun 1983 ditegaskan kembali bahwa SKBRI hanya berlaku bagi mereka yang mengambil surat pernyataan Dwi Kewarganegaraan lalu menyatakan keinginan menjadi WNI. Di era Orde Baru, SBKRI merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, untuk mempermudah orang-orang Tionghoa dalam mengurus berbagai keperluan dokumen, seperti mengurus KTP, permohonan Paspor, memasuki dunia pendidikan, pendaftaran pemilu, menikah, dan bahkan untuk mengurus keperluan meninggal dunia.

Permasalahan status kewarganegaraan orang-orang Tionghoa di Indonesia menjadi bukti bahwa orang-orang Tionghoa di Indonesia masih kesulitan mendapat status kewarganegaraan mereka hingga masa Orde Baru, dan seringkali masih dianggap sebagai orang asing dan hak-hak mereka sebagai warga negara. Ditambah dengan sentimen anti-Tionghoa yang beredar di kalangan masyarakat menyebabkan mudah goyahnya kesatuan bangsa Indonesia yang tak luput dari tindakan kerusuhan.

Implementasi Kebijakan Asimilasi Terhadap etnis Tionghoa

Suryomenggolo (2003:77) menjelaskan bahwa terdapat tiga keputusan terhadap etnis Tionghoa

berdasarkan keputusan sidang MPRS tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Resolusi MPRS No. III/MPRS/1966 Tentang Pembinaan Kesatuan Bangsa. Melalui salah satu pasalnya, resolusi ini secara eksplisit menyatakan asimilasi sebagai satu-satunya jalan bagi etnis Tionghoa untuk meleburkan diri.
2. Resolusi MPRS No. XXVII/MPRS/1966 Tentang Agama, pendidikan, dan kebudajaan. Resolusi ini secara tegas mendesak Pemerintah untuk mengeluarkan UU larangan terhadap sekolah-sekolah asing dan agar pemerintah membina kebudayaan daerah-daerah.
3. Resolusi MPRS No. XXXII/MPRS/1966 Tentang pembinaan pers. Resolusi ini menyatakan bahwa penerbitan pers dalam Bahasa Tionghoa menjadi monopoli pemerintah. Surat kabar "Harian Indonesia" diterbitkan sehubungan dengan itu.

Sejak tahun 1966 tidak ada satupun sekolah menengah Tionghoa di Indonesia yang diizinkan untuk beroperasi, sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 1957 yang memiliki banyak sekolah-sekolah Tionghoa. Tahun 1968 pemerintah mengizinkan beberapa Sekolah Nasional Proyek Khusus untuk anak-anak Tionghoa warga negara asing, namun sekolah-sekolah tersebut akhirnya ditutup pada tahun 1975. Upaya orang tua mereka yang menginginkan anak-anaknya belajar Bahasa Tionghoa adalah dengan memanggil guru les ke rumah, namun hal itu tidak dilakukan, sehingga kemampuan anak-anak mereka dalam berbahasa Tionghoa sangat terbatas.

Di bidang kebudayaan etnis Tionghoa sangat sulit mengekspresikan kebudayaan mereka. Hal tersebut karena konsep dari asimilasi yang diterapkan oleh pemerintah Soeharto. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah, lewat asimilasi, semua komunitas etnis Tionghoa sebagai komunitas yang terpisah akan lenyap.

Larangan terhadap merayakan hari raya dan melakukan tradisi lainnya di depan umum tidak terlalu berpengaruh terhadap indigenisasi. Malahan kerap etnis Tionghoa menjadi lebih tertutup karena mereka hanya melakukannya hanya di sebatas keluarga yang ada di rumah mereka.

Leo Suryadinata menyatakan bahwa namun dalam praktik seringkali asimilasi berjalan dengan kabur dan bertentangan dan bahkan dalam beberapa kebijakan Soeharto cenderung anti asimilasi karena pertimbangan kondisi politis. Sebagai contoh, toleransi terhadap agama-agama minoritas dan pembedaan antara pribumi dan nonpribumi cenderung malahan memilah, dan bukan mempersatukan etnik Tionghoa dan orang Indonesia asli. Dengan perkataan lain, etnik Tionghoa tetap terpisah dari komunitas tuan rumah (Leo Suryadinata, 2003:2).

Praktik Korupsi Pengusaha Tionghoa

Tahun 1998 Bank Indonesia berupaya kembali dalam mengatasi krisis ekonomi dengan memberikan bantuan menyalurkan dana BLBI sebesar 147,7 triliun kepada 48 bank di dalam negeri. BLBI yang diberikan Bank Indonesia kepada

bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini juga merupakan berdasarkan atas perjanjian Indonesia dengan IMF.

Namun dalam perjalanannya, audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Agustus 2000 terhadap penyaluran dan penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut menemukan adanya penyimpangan, kelemahan sistem, dan kelalaian yang menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp 138,442 triliun. Jumlah potensi kerugian tersebut mencapai 95,78 persen dari total BLBI yang disalurkan posisi tanggal 29 Januari 1999.

Sebagian dari beberapa oknum yang melakukan penyelewengan dana BLBI tersebut merupakan pengusaha Tionghoa. Namun, ketika Indonesia mengalami krisis, pemerintah berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan bantuan dana BLBI, tetapi terdapat oknum-oknum yang melakukan penyelewengan dana tersebut. Akhirnya krisis tak kunjung pulih dan semakin parah.

Pemukiman Yang Terpisah

Pemukiman etnis Tionghoa masa kini merupakan hasil dari kebijakan Pemerintah Kolonial yang sengaja memisahkan mereka dari masyarakat pribumi. Wibowo menyatakan bahwa Jakarta atau Batavia pada masa awal kedatangan Belanda dengan jelas telah menunjukkan segresi struktur pemukiman Belanda, yaitu: Kastil Batavia untuk para penguasa, *Chineesen Wijk* atau "Kampung Cina" untuk kelompok etnis Cina dan *native settlement* kelompok pribumi yang tersebar di luar kedua wilayah pertama itu (Wibowo, 2000:204). Adanya pemukiman Tionghoa yang telah terbentuk sedemikan rupa, tidak lepas dari peraturan-peraturan pemerintah baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan, sehingga mereka enggan untuk meninggalkan pemukiman yang telah terbentuk sejak lama.

Ketika Belanda pergi meninggalkan Indonesia, pemukiman-pemukiman Tionghoa yang sudah terbentuk lama itu sangat sulit untuk diubah atau dihilangkan, sehingga mayoritas etnis Tionghoa memiliki pemukiman-pemukiman yang sebagian besar hanya mereka yang ada di dalamnya. Hal tersebut terus berlangsung hingga Indonesia sudah merdeka. Adanya kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Orde Lama dalam hal perluasan Kota Jakarta membuat masyarakat Tionghoa juga meluaskan pemukiman mereka.

Melalui kebijakan Kotapraja Jakarta pada masa Orde Lama pemerintah Republik Indonesia meluaskan kota Jakarta sehingga terbentuk daerah-daerah hunian baru seperti Jakarta Barat, perlahan-lahan masyarakat Tionghoa juga meluaskan pemukiman mereka. Kali ini mereka lebih mengutamakan daerah tempat tinggal, bukan tempat usaha sehingga muncul daerah Cideng hingga Grogol. Sementara itu, perluasan Glodok mencakup pula daerah Jembatan Dua, Jembatan Tiga, dan Jembatan Lima. Tahap ini kemudian berlanjut ketika Pemda DKI Jakarta memberi izin dibukanya pemukiman baru dalam bentuk real estat, seperti pluit-Muara Karang, Kelapa gading, dan terakhir Pantai Mutiara (Wibowo, 2000:208).

Apabila ditinjau kembali pada tempat-tempat kejadian

Kerusuhan Mei 1998 baik itu perusakan, penjarahan terdapat beberapa titik tempat yang mayoritas dihuni oleh masyarakat Tionghoa di Jakarta seperti di Glodok, Grogol, Jembatan Besi, Jembatan Dua, Jembatan Tiga yang ternyata letaknya dekat dengan lokasi awal mulanya Kerusuhan tersebut yaitu di kawasan Grogol.

Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta

Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta terjadi pada tanggal 13-15 Mei 1998. Terjadinya Krisis ekonomi mulai dari pertengahan tahun 1997 dan adanya Peristiwa Trisakti tanggal 12 Mei 1998 menjadi faktor pemicu atas terjadinya kerusuhan tersebut. Pada peristiwa tersebut terjadi kekacauan yang luar biasa, sehingga menimbulkan kerugian-kerugian yang besar pula baik dari ekonomi maupun korban manusia. Apabila ditinjau kembali peristiwa Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, pemukiman dan pertokoan usaha milik etnis Tionghoa merupakan salah satu objek atas kerusuhan tersebut. Harta benda milik etnis Tionghoa dijarah, dirusak, dan dibakar. Tidak dapat dipungkiri bahwa etnis Tionghoa merupakan salah satu dari korban atas peristiwa tersebut.

Kerusuhan bermula di perempatan Jalan Layang dimana terjadi sebuah pembakaran truk sampah, melihat kobaran api dari truk sampah massa kemudian menjadi brutal dan mulai melempari barisan aparat yang memblokir jalan di depan gedung Mal Ciputra dengan batu, botol, dan benda lainnya. Isi mobil dijarah dan dibakar oleh massa, di area PT Putra Surya Multidana enam mobil dibakar dan satu dirusak. Gedung BCA dan sejumlah pun ikut menjadi sasaran amukan massa.

Kerusuhan yang terjadi pada tanggal 13-15 Mei 1997 sangat mencekam, banyak masyarakat yang tidak berani keluar rumah mereka, khususnya etnis Tionghoa karena kerusuhan tersebut diwarnai dengan isu rasial anti-Cina seperti yang terjadi beberapa wilayah seperti Jembatan Sempit Angke, Jembatan Dua, Jembatan Tiga, dan Jembatan Besi adanya kerusuhan yang berupa pengrusakan dan penghancuran. Massa mulai menjarah rumah-rumah dan beberapa toko bahkan dibakar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah tertulis dalam bab di atas, maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi etnis Tionghoa menjadi Korban pada Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta yaitu :

1. Kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap etnis Tionghoa dengan adanya kebijakan UUPMA (Undang-Undang Penanaman Modal Asing) Tahun 1967 yang menyebabkan perekonomian etnis Tionghoa melejit di atas orang-orang pribumi yang disertai dengan adanya relasi antara pengusaha Tionghoa dengan pemerintah Orde Baru, sehingga mereka mampu menguasai perekonomian di Indonesia.
2. Peraturan tentang Status kewarganegaraan etnis Tionghoa dan sentimen anti Tionghoa. Permasalahan status kewarganegaraan etnis Tionghoa yang tak kunjung usai pada masa Orde Baru membuat mereka kesulitan dalam kehidupan bernegara yang disertai dengan sentimen anti-Tionghoa yang meluas dikalangan

masyarakat, sehingga mereka merasa keberadaan mereka kurang aman.

3. Implementasi kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa diterapkan pemerintah Orde Baru tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan permasalahan etnis Tionghoa di Indonesia sehingga mereka masih memiliki sifat yang eksklusif dan masih adanya sentimen anti-Tionghoa.

4. Relasi antara penguasa dan pengusaha pada masa Orde Baru, hak-hak istimewa yang diberikan kepada pengusaha Tionghoa membuat mereka memiliki akses kemudahan dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis. Hal ini menjadi suatu hubungan yang tidak sehat yang membuat masyarakat menaruh perasaan tidak suka terhadap keduanya.

5. Praktik korupsi yang dilakukan oleh para pengusaha Tionghoa yang secara tidak langsung ikut membuat Indonesia jatuh ke dalam kondisi krisis ekonomi dan tak kunjung pulih pada tahun 1997-1998.

6. Adanya permukiman terpisah yang penghuninya adalah mayoritas etnis Tionghoa membuat tempat tinggal mereka mudah untuk di kenali, sehingga ketika kerusuhan terjadi terdapat beberapa wilayah yang dirusak dan dijarah yang diidentifikasi sebagai wilayah pemukiman mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad. 1998. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Angkasa.

Brata, Sumadi Surya. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali.

Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah (terjemahan)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Haryanto, Sindung. 2012. *Spektrum Teori Sosial: dari klasik hingga postmodern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Husodo, Siswono Yudo. 1985. *Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia)*. Jakarta: Lembaga Penelitian Yayasan Padamu Negeri.

Kasenda, Peter. 2015. *Hari-Hari Terakhir Orde Baru* Menelusuri *Akar Kekerasan Mei 1998*. Depok: Komunitas Bambu.

Mahmudy, Mahdi. 2003. Setahun Krisis Asia : Beberapa Pelajaran yang Dapat Diambil Dari Krisis Tersebut. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 1(2), 185-201*.

Nawawi, Hadari. 1991. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : UGM Press.

Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suryadinata, Leo. 2003. *Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturisme?* Antropologi Indonesia 71.

Suryomenggolo, J. 2003. *Hukum Sebagai Alat Kekuasaan: politik asimilasi Orde baru*. Jakarta: Galang Press, Elkasa.

Syukur, Abdul, Diana Nomida M, et al. 2012. *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Orde Baru dan Reformasi*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Tobing, Fredy B.L. 2013. *Praktik Relasi Kekuasaan Soeharto dan Krisis Ekonomi 1997-1998*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Wibowo, I. 2000. *Harga yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan etnis Cina di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Yusuf, Muri. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitiatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenamedia Group.